

IDENTIFIKASI DAN POLA PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KECAMATAN BINJAI KOTA (Studi Kasus : Kelurahan Setia)

Liofanni Malau ¹⁾, Rahmad Dian Sembiring ²⁾, Dessy Eresina Pinem³⁾

¹⁾Praktisi Perencanaan Kota

^{2),3)}Dosen, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Jl. DR.TD.Pardede No. 8, Medan 20153

¹⁾liofannimalau@gmail.com

²⁾rdians@yahoo.com

³⁾eresina22@yahoo.com

Abstrak

Kelurahan Setia merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Binjai Kota, dimana pada kelurahan Setia ini terdapat kawasan yang teridentifikasi kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 Tentang Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, yaitu di tepatnya dilingkungan II, III, IV dan V. Dimana pada tiap lingkungan terdapat kriteria kumuh yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil survey lapangan, dilihat dari segi fisiknya gambaran kondisi kekumuhan di lokasi penelitian yaitu permukiman penduduk yang sebagian terletak di bantaran sungai, letak bangunan rumahnya relatif acak, tidak berpola dan termasuk bangunan yang padat, sehingga rawan bencana kebakaran, kemudian lingkungan ini juga di perburuk oleh kualitas sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan tidak ada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi lingkungan seperti ini akan terus mengalami penurunan kualitas lingkungan jika tidak ditanggapi dengan serius maka diperlukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah timbulnya kawasan kumuh baru. Adapun kriteria-kriteria yang di analisa adalah kondisi kekumuhan berupa kondisi bangunan, kondisi jaringan jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran, kondisi legalitas tanah berupa kejelasan status penguasaan tanah kesesuaian Rencana Tata Ruang, identifikasi pertimbangan lain berupa nilai strategis lokasi, kependudukan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan hasil identifikasi dan pembobotan maka diketahui bahwa Lingkungan II, III dan IV merupakan kawasan kumuh sedang dengan legalitas tanah merupakan tanah legal sedangkan untuk Lingkungan V merupakan kawasan kumuh berat dengan legalitas tanah merupakan sebagian tidak memiliki surat tanah sehingga dapat diketahui pola penanganan yaitu si lingkungan II, III dan IV pola penanganannya peremajaan sedangkan di Lingkungan V pola penanganannya adalah permukiman kembali.

Kata Kunci : Permukiman, Kawasan, Kumuh, Penanganan

1. PENDAHULUAN

Kota pada umumnya berawal dari suatu permukiman kecil yang secara spasial mempunyai lokasi strategis bagi kegiatan perdagangan (Sandi, 1978). Suatu kota dapat terbentuk dari adanya konsentrasi penduduk yang mungkin awalnya hanya terdiri dari puluhan atau ratusan orang, tetapi kemudian terus berkembang hingga belasan juta orang dengan membentuk sejumlah lokasi permukiman. Dari proses tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu permukiman merupakan salah satu bagian dari pembentuk kota. Permukiman merupakan titik awal dimana suatu kota tumbuh dan berkembang.

Kota Binjai memiliki luas 9.023,62 Ha dan terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Utara. Diantara kecamatan ini kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Binjai Kota 168 Jiwa/Ha. Dengan angka kepadatan penduduk di kecamatan ini maka akan lebih besar peluang timbulnya permukiman kumuh. Permukiman yang semakin banyak bertumbuh di Kecamatan Binjai Kota secara tidak beraturan akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai terdapat 35 lingkungan yang merupakan kawasan kumuh dengan luas 501,13 ha dimana pada Surat Keputusan Walikota Binjai ini termasuk juga Kelurahan Setia tepatnya di Lingkungan V dan VI dengan tingkat kekumuhan sedang, dapat dilihat pada lampiran I. Sedangkan Berdasarkan hasil survey lapangan di Kelurahan Setia terdapat 4 (empat) lokasi kumuh yang teridentifikasi berdasarkan PUPERA No 02 tahun 2016 yaitu Lingkungan II, III, IV dan V.

Dilihat dari segi fisik, gambaran kondisi kekumuhan di lokasi penelitian yaitu permukiman penduduk yang sebagian terletak di bantaran sungai, letak bangunan rumahnya relatif acak, tidak berpola dan termasuk bangunan yang padat, sehingga rawan bencana kebakaran, kemudian lingkungan ini juga di perburuk oleh kualitas sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan tidak ada Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kondisi lingkungan seperti ini akan terus mengalami penurunan kualitas lingkungan jika tidak ditanggapi dengan serius maka diperlukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah timbulnya kawasan kumuh baru, maka dilakukan kajian mengenai Identifikasi Dan Pola Penanganan Kawasan Kumuh Di Kecamatan Binjai Kota (Studi Kasus : Kelurahan Setia).

2. METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer

dilakukan dengan pengamatan kawasan kumuh secara langsung di kelurahan Setia dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi fisik lingkungan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan yang menyebabkan timbulnya kekumuhan pada Kelurahan Setia. Wawancara/tanya jawab dilakukan terhadap responden yang dianggap dapat mewakili kelompoknya baik formal maupun informal, yang diarahkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai informasi lingkungan kumuh, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala lingkungan yang lebih mengetahui kondisi fisik lingkungan pada masing masing lingkungan yang merupakan kawasan kumuh. Sedangkan Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian dengan mencari buku/ sumber informasi lain yang relevan, guna memperkuat landasan teori penelitian, kondisi dan permasalahan. Data sekunder ini juga bias didapat dari instansi pemerintah.

Teknik analisa data pada kajian ini menggunakan metode pembobotan yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 Tentang Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, dimana pemberian bobot dilakukan pada setiap kriteria kumuh yang terdapat pada lokasi penelitian. Nilai bobot yang diberikan pada kriteria-kriteria kumuh adalah sebagai berikut : Nilai Bobot 5 = untuk 76%-100% kawasan yang tidak terlayani, Nilai Bobot 3 = untuk 51%-75% kawasan yang tidak terlayani, Nilai Bobot 1 = untuk 25%-50% kawasan yang tidak terlayani

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Binjai Kota adalah salah satu dari lima kecamatan yang terdapat di Kota Binjai, terletak pada posisi tengah dari Kota Binjai. Dilihat dari topografinya, Kecamatan Binjai Kota terletak ± 30 m diatas permukaan laut terletak pada posisi 3° 31' 40" – 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Binjai Kota adalah berupa daratan seluas 412 Ha. Kecamatan Binjai Kota, terdiri atas 7 kelurahan dan 51 lingkungan. Secara administratif Kecamatan Binjai Kota mempunyai batas wilayah sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Kecamatan Binjai Utara.
Sebelah Selatan	: Kecamatan Binjai Selatan.
Sebelah Timur	: Kecamatan Binjai Timur.
Sebelah Barat	: Kecamatan Binjai Barat.

Kelurahan setia merupakan salah satu dari 6 (enam) kelurahan yang terdapat di Kecamatan Binjai Kota. Kota Binjai. Lokasi permukiman kumuh pada Kelurahan Setia terdapat pada 4 (empat) lingkungan yaitu Lingkungan II, Lingkungan III, Lingkungan IV dan Lingkungan V. Luas total kawasan kumuh ini adalah 8,63 ha dengan jumlah penduduk 2740 Jiwa

maka rata-rata kepadatan penduduk pada kawasan kumuh ini adalah 328 jiwa/ha.

A. Analisa Pembobotan Kriteria Kumuh

Metode pembobotan yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 Tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dimana pemberian bobot dilakukan pada setiap kriteria kumuh yang terdapat pada lokasi penelitian. Nilai bobot yang diberikan pada kriteria-kriteria kumuh adalah sebagai berikut :

Nilai Bobot 1 = untuk 25%-50% kawasan yang tidak terlayani

Nilai Bobot 3 = untuk 51%-75% kawasan yang tidak terlayani

Nilai Bobot 5 = untuk 76%-100% kawasan yang tidak terlayani

1. Kondisi Bangunan Gedung

• Ketidakteraturan Bangunan

Penilaian ketidakteraturan bangunan dilakukan dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak teratur}}{\text{Total jumlah bangunan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan pada masing-masing lokasi kawasan kumuh, terdapat bangunan yang teratur dan yang tidak teratur. Di Lingkungan II terdapat 77 unit bangunan dimana 32 unit merupakan bangunan teratur dan 45 unit bangunan lainnya tidak teratur, pada Lingkungan III terdapat 172 unit bangunan dengan jumlah bangunan teratur ada sebanyak 71 unit dan bangunan tidak teraturnya ada sebanyak 101 unit, di lingkungan IV terdapat 199 unit bangunan dimana 64 unit bangunan teratur dan 135 unit bangunan tidak teratur, dan di Lingkungan V terdapat 111 unit bangunan dimana 25 unitnya merupakan bangunan teratur dan 86 unit bangunan lainnya merupakan bangunan tidak teratur. maka nilai bobot yang didapat pada Lingkungan II, III dan IV memiliki nilai bobot 3 (tiga) sedangkan untuk Lingkungan V nilai bobotnya 5 (lima)

• Tingkat kepadatan bangunan

kepadatan bangunan di kota sedang dan kecil, yaitu :

a. Kepadatan bangunan tinggi (>100 unit/Ha)

b. Kepadatan bangunan sedang (80 – 100 unit/Ha)

c. Kepadatan bangunan rendah (<80 unit/Ha)

$$\text{Kepadatan bangunan} = \frac{\text{Jumlah unit bangunan (unit)}}{\text{Luas wilayah (Ha)}}$$

Berdasarkan hasil survey jumlah total semua bangunan di kawasan kumuh ada 559 unit bangunan dengan luas 8,63 ha maka Nilai bobot untuk kepadatan bangunan bervariasi pada masing-masing lingkungan, di Lingkungan II memiliki persentase 42% maka nilai

bobotnya 1 (satu), Lingkungan III memiliki persentase 58% maka nilai bobotnya 3 (tiga), Lingkungan IV memiliki persentase 76% maka nilai bobotnya 5 (lima) dan Lingkungan V memiliki persentase 90% maka nilai bobotnya 5 (lima)

• Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

kualitas bangunan di kawasan ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu temporer, semi permanen dan permanen. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat ditemui pada bangunan temporer dan semi permanen, dimana bangunan ini memiliki kondisi yang buruk sehingga hal ini dapat mengurangi nilai kondisi fisik di suatu lingkungan. Maka Dengan mengetahui jumlah bangunan yang tidak memenuhi syarat didapatkan nilai bobot 3 (tiga) untuk Lingkungan II dan III sedangkan untuk Lingkungan IV dan V nilai bobotnya 5 (lima).

2. Kondisi Jalan Lingkungan

• Cakupan pelayanan jalan lingkungan

Untuk mengetahui persentase pelayanan jaringan jalan yang ada pada kawasan kumuh dengan mengetahui jumlah bangunan yang terlayani jaringan jalan. Maka dilakukan dengan penilaian sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan jalan} = \frac{\text{Jlh bangunan tidak terlayani}}{\text{Total Bangunan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan jumlah total bangunan yang terlayani jaringan jalan lingkungan sebanyak 273 unit sedangkan untuk bangunan yang tidak terlayani sebanyak 286 unit. Maka bobot di Lingkungan II dan IV adalah 3 (tiga) , di Lingkungan III adalah 1 (satu) dan di Lingkungan V adalah 5 (lima).

• Kualitas permukaan jalan lingkungan

kondisi jaringan jalan lingkungan di kawasan kumuh, lingkungan yang memiliki panjang kerusakan yang sedikit terdapat di Lingkungan II yaitu 40,05 meter yang mengalami kerusakan dari total panjang jalan lingkungan 267,33 meter sedangkan untuk lingkungan yang memiliki panjang jalan yang mengalami kerusakan terpanjang ada di Lingkungan IV yaitu 249,46 meter dari total panjang jalan lingkungan 489,09 meter. Dengan mengetahui panjang jalan lingkungan yang mengalami kerusakan maka penilaian dilakukan berdasarkan kondisi di lokasi penelitian dimana Lingkungan II dan III memiliki nilai bobot 1 dengan persentase 15% dan 24%, Lingkungan III nilai bobotnya 3 dengan persentase 51% dan Lingkungan V nilai bobotnya 5 dengan persentase 76%.

3. Kondisi Penyediaan Air Minum

• Ketidakterediaan akses aman air minum

Berdasarkan kondisi di lapangan diketahui bahwa di Lingkungan II merupakan lingkungan yang paling sedikit menggunakan sumur gali atau tangki air yaitu terdapat 18 unit bangunan yang masih menggunakan sumur gali, sedangkan lingkungan terbanyak yang menggunakan sumur gali ada di Lingkungan V yaitu sebanyak 37 unit bangunan yang menggunakan sumur gali. Maka nilai bobot yang dihasilkan adalah 1 (satu), dimana angka persentase nilainya berkisar 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman.

- **Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum**

Berdasarkan hasil survey lapangan lingkungan yang memiliki sumur yang pelayanannya paling sedikit terlayani ada pada Lingkungan II yaitu 50 unit sedangkan lingkungan yang terbanyak tidak terlayani berada di Lingkungan V sebanyak 124 unit bangunan. Maka dengan mengetahui jumlah bangunan yang tidak terlayani air minum maka diketahui bahwa nilai bobot pada masing-masing lingkungan berbeda. Di Lingkungan II, III dan IV memiliki nilai bobot 3 (tiga) dan Lingkungan V memiliki nilai bobot 5 (lima).

4. Kondisi Drainase Lingkungan

- **Ketidakhampuan mengalirkan limpasan air**

Penilaian dilakukan dengan mengetahui luas area yang terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun. Dimana di Lingkungan II terdapat 0,0019 hektar area yang tergenang dari total drainase 0,0205 hektar, Lingkungan III terdapat 0,0069 hektar area yang tergenang dari total drainase 0,0477 hektar, Lingkungan IV terdapat 0,0038 hektar area yang tergenang dari total drainase 0,0365 hektar dan pada Lingkungan V tidak terdapat drainase pada kawasan kumuh dalam penelitian ini. Maka dari luasan yang telah diketahui maka didapati nilai bobot pada masing-masing lingkungan adalah 1(satu) terkecuali untuk Lingkungan V memiliki nilai 5 (lima) dimana tidak ada drainase yang tersedia sedangkan terkadang terjadi genangan apabila hujan turun deras sehingga meluap ke jalan.

- **Ketidakhadiran drainase**

Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah bangunan yang tidak terlayani drainase}}{\text{Jumlah total bangunan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan jumlah bangunan yang terlayani drainase lingkungan sebanyak 145 unit dan yang tidak terlayani 414 unit. Dimana Lingkungan yang tidak terlayani drainase angka terkecilnya ada di Lingkungan II yaitu 51 unit sedangkan angka terbesarnya ada di Lingkungan IV dengan 156 unit bangunan yang tidak terlayani drainase lingkungan, Lingkungan V tidak memiliki drainase lingkungan sehingga pada lingkungan ini

diberi angka 111 unit bangunan yang tidak terlayani drainase. Maka nilai bobotnya Lingkungan II dan III memiliki Nilai bobot 3(tiga) sedangkan Lingkungan IV dan V memiliki Nilai bobot 5(lima).

- **Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan**

Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{luas drainase yang tidak terhubung}}{\text{Luas total drainase}} \times 100 \%$$

Dari hasil survey lapangan drainase yang ada di Lingkungan II dan III terhubung dengan hirarki di atasnya sehingga luasannya adalah 0 hektar, Lingkungan IV terdapat 0,0067 hektar drainase yang tidak terhubung dengan hirarki di atasnya. Sedangkan Lingkungan V tidak terdapat drainase. Maka untuk parameter drainase lingkungan yang tidak terhubung dengan hirarki di atasnya diberi bobot 1 (satu) pada Lingkungan I, II dan III sedangkan untuk Lingkungan V diberi nilai bobot 5 (lima) dimana keseluruhan lingkungan tidak terlayani drainase.

- **Tidak terpeliharanya drainase**

Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas drainase yang kotor}}{\text{Luas total drainase}} \times 100\%$$

Dari hasil survey lapangan drainase yang kotor dan berbau disebabkan masyarakat membuang sampah pada drainase sehingga sampah tersebut menumpuk dan mengakibatkan tersumbatnya drainase, pada saat hujan turun maka air tidak dapat mengalir sehingga terjadilah genangan. Akibat genangan ini drainase jadi kotor dan bau. Di Lingkungan II terdapat 0,0059 hektar drainase yang tidak terpelihara dari total 0,0205 hektar, Lingkungan III terdapat 0,0082 hektar drainase yang tidak terpelihara dari total 0,0477 hektar dan Lingkungan IV terdapat 0,0216 hektar drainase yang tidak terpelihara dari total 0,0365 hektar. Maka nilai bobot di Lingkungan II, III dan IV adalah 1 (satu) dan di Lingkungan V adalah 5 (lima).

- **Kualitas konstruksi drainase**

Penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{luas konstruksi drainase yang buruk}}{\text{Luas total drainase}} \times 100\%$$

Dari hasil penelitian di lapangan luas konstruksi drainase yang mengalami kerusakan terdapat 0,0281 hektar dari total luas drainase 0,1024 hektar. Dengan nilai luasan dari hasil penelitian di lapangan maka diketahui persentase dan nilai bobot pada masing-masing lingkungan. Dimana Lingkungan II memiliki persentase 21% dengan nilai bobot 1, Lingkungan III memiliki persentase 32% dengan nilai bobot 1, Lingkungan IV memiliki persentase 35% dengan nilai bobot 1 dan Lingkungan V memiliki persentase 100%

dengan nilai bobot 5 (lima) dimana lingkungan ini tidak terlayani konstruksi drainase.

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah

- **Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis**

Jumlah bangunan yang masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi standar teknis maka persentase diketahui dimana jumlah total bangunan yang memiliki jamban dan septik tank tidak sesuai standar ada sebanyak 320 unit bangunan sedangkan total bangunan di kawasan kumuh yang memenuhi standar teknis ada sebanyak 200 unit bangunan. Maka untuk parameter air limbah yang tidak sesuai standar teknis diketahui bahwa pada Lingkungan II persentasenya 49% dengan nilai bobot 1 (satu), Lingkungan III persentasenya 40% dengan nilai bobot 1 (satu), Lingkungan IV persentasenya 68% dengan nilai bobot 3 (tiga) dan Lingkungan V persentasenya 70% dengan nilai bobot 3 (tiga).

- **Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan Persyaratan Teknis**

Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah di kawasan kumuh memiliki total 559 unit bangunan dimana 161 bangunan terlayani sarana prasarana sesuai standar sedangkan sebanyak 363 unit bangunan tidak terlayani sarana prasarana sesuai standar. Maka dengan mengetahui jumlah kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah maka untuk bobot area memiliki nilai yang berbeda. Untuk lingkungan II dan III memiliki nilai bobot 3 (tiga) sedangkan Lingkungan IV dan V memiliki nilai bobot 5 (lima).

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan

- **Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis**

Berdasarkan hasil survey di lapangan lokasi kawasan kumuh tidak memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis hal ini disebabkan tidak adanya tempat pengumpulan baik itu tempat pengumpulan ataupun truk sampah yang melayani tiap minggu sehingga warga membuang sampah pada satu titik lokasi dan juga mengolah sendiri dengan cara dibakar. Dimana dari total bangunan 559 unit, hanya 88 unit yang memiliki yang sesuai standar teknis dan 458 unit bangunan tidak sesuai standar teknis. Maka dengan mengetahui jumlah bangunan yang tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis, Maka diketahui nilai bobot masing-masing lingkungan pada

kawasan kumuh dimana Lingkungan II, IV dan V memiliki nilai bobot 5 (lima) sedangkan Lingkungan III memiliki nilai bobot 3 (tiga).

- **Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis**

Berdasarkan hasil survey di lapangan lokasi kawasan kumuh tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis hal ini disebabkan minimnya pelayanan sistem pengelolaan sampah pada kawasan ini. Dimana dari total jumlah bangunan yang ada pada kawasan kumuh yaitu 559 unit bangunan terdapat 60 unit bangunan yang melakukan pengumpulan sampah. Maka dengan mengetahui jumlah bangunan yang tidak memiliki sistem pengelolaan persampahan yang sesuai standar teknis, Maka diketahui nilai bobot masing-masing lingkungan pada kawasan kumuh dimana Lingkungan II, IV dan V memiliki nilai bobot 5 (lima) sedangkan Lingkungan III memiliki nilai bobot 3 (tiga).

- **Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan**

Untuk point ini peneliti memberikan skor (5) hal ini dikarenakan tinggi lokasi yang belum terlayani dan belum ada tempat sampah yang terbangun sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala.

7. Kondisi Proteksi Kebakaran

- **Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran**

Berdasarkan hasil survey di lapangan lokasi kawasan kumuh memiliki prasarana kebakaran yaitu pasokan air dimana pada lokasi terdapat sungai mencirim, akan tetapi akses yaitu jalan lingkungan tidak mendukung untuk pengambilan air ini karena lebar jalan lingkungan sangat sempit. Sehingga penilaian untuk prasarana kebakaran diberi nilai bobot 5 (lima) pada masing-masing lingkungan.

- **Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran**

Berdasarkan hasil survey di lapangan, lokasi kawasan kumuh ini belum memiliki sarana proteksi kebakaran seperti mobil pompa, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), mobil tangga dan peralatan lainnya. Sehingga untuk penilaian bobot pada indikator ini peneliti memberikan bobot 5 (lima).

Untuk rekapitulasi pembobotan kondisi kekumuhan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel
Rekapitulasi Hasil Pembobotan Kawasan Kumuh

No	Kriteria Indikator Masalah Permukiman	Sub Kriteria Indikator Masalah Permukiman	Nilai Bobot			
			Lingkungan			
			II	III	IV	V
1	Kondisi Bangunan Kawasan Kumuh	Ketidak teraturan bangunan	3	3	3	5
		Tingkat kepadatan bangunan	1	3	5	5
		Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat	3	3	5	5
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	3	1	3	5
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	1	1	3	5
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidaktersediaan akses aman air minum	1	1	1	1
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	3	3	3	5
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	1	1	1	5
		Ketidaktersediaan drainase	3	3	5	5
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	1	1	1	5
		Tidak terpeliharanya drainase	1	1	1	5
		Kualitas konstruksi drainase	1	1	1	5
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	1	1	3	3
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3	3	5	5
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5	3	5	5
		Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	5	5	5	5
		Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5	5	5	5
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran	5	5	5	5
		Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	5	5	5	5
Total			51	49	65	89

Berdasarkan hasil pembobotan dimana suatu lokasi merupakan Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95, Kumuh sedang bila memiliki nilai 45 – 70 dan Kumuh ringan bila memiliki nilai 19 – 44. Maka hasil identifikasi kekumuhan ini mengetahui menyatakan bahwa Lingkungan II merupakan kumuh sedang dengan nilai total bobot 51, Lingkungan III merupakan kumuh sedang dengan nilai total bobot 49, Lingkungan IV merupakan kumuh sedang dengan nilai total bobot 65 dan Lingkungan V merupakan kumuh berat dengan nilai total bobot 89.

B. Analisa Penentuan Klasifikasi Dan Prioritas Penanganan

Berdasarkan formulasi penilaian klasifikasi dan skala prioritas penanganan berikut diketahui bahwa Lingkungan II memiliki klasifikasi B1, Lingkungan III memiliki klasifikasi B1, Lingkungan II memiliki klasifikasi B1, Lingkungan IV memiliki klasifikasi B1 dan Lingkungan V memiliki klasifikasi A2. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.2 Tahun 2016 Tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh skala prioritas penanganan pada masing-masing lingkungan yaitu Lingkungan II, III dan IV adalah prioritas nomor 2 (dua) sedangkan Lingkungan V adalah prioritas nomor 1 (satu).

C. Pola Penanganan Kawasan Kumuh

Pola penanganan kawasan kumuh terbagi menjadi 3 (Tiga) antara lain :

1. Pemugaran kawasan kumuh
2. Peremajaan kawasan kumuh, dan
3. Permukiman kembali

Maka diketahui bahwa pola penanganan pada Lingkungan II, III dan IV adalah pola penanganan dalam bentuk peremajaan sedangkan untuk Lingkungan IV dilakukan bentuk permukiman kembali.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembobotan yang dilakukan menunjukkan bahwa Lingkungan II, III, dan IV memiliki kriteria kumuh sedang dan Lingkungan V memiliki kriteria kumuh berat. Maka Pola penanganan yang dilakukan

pada kawasan kumuh yaitu di Lingkungan II, III dan IV merupakan peremajaan kawasan kumuh dan Lingkungan V dilakukan pola penanganan kawasan kumuh dalam bentuk permukiman kembali.

Pemerintah Kota Binjai agar memberikan perhatian pada kondisi-kondisi lingkungan tempat bermukim warga, yaitu dengan melakukan pencegahan ataupun peningkatan kualitas lingkungan di lokasi kawasan kumuh.

5 . DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Muchsini, etc. 2011. *Penyehatan Permukiman*. Yogyakarta : Gonyen Publishing

Wunas, Shirly. 2011. *Kota Humanis*. Surabaya : Brilian Internasional

Peraturan :

BAPPEDA. *Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)*. Binjai : 2017

Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Pola Penanganan Kawasan Kumuh*. Vol. 1 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016. *Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh*. Jakarta : PUPERA

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014. *Cara Perhitungan SPM*. Jakarta : PUPERA

Internet :

Bagus, etc. *Sistem Perumahan dan Permukiman Liar di Bantaran Sungai Kalimalang, Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat*, https://www.academia.edu/12689445/permukiman_liar_di_kabupaten_bekasi. Diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

Fachrudin, Yudi. *Teknik Analisis Data Kualitatif*, 2013. https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif. Diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

Tato, Syahriar. *Tesis Tentang Permukiman Kumuh Mariso*.

<https://syahriartato.wordpress.com/2013/05/26/tesis-tentang-permukiman-kumuh-mariso>.

Diakses tanggal 3 November 2017